



# **Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dalam rangka Menunjang Pembangunan Kesehatan**

**Emil Agustiono**

**Deputi III Menko Kesra**

**RAKERKESNAS DEPKES TAHUN 2008  
SURABAYA, 21 OKTOBER 2008**



## 1. Latar Belakang

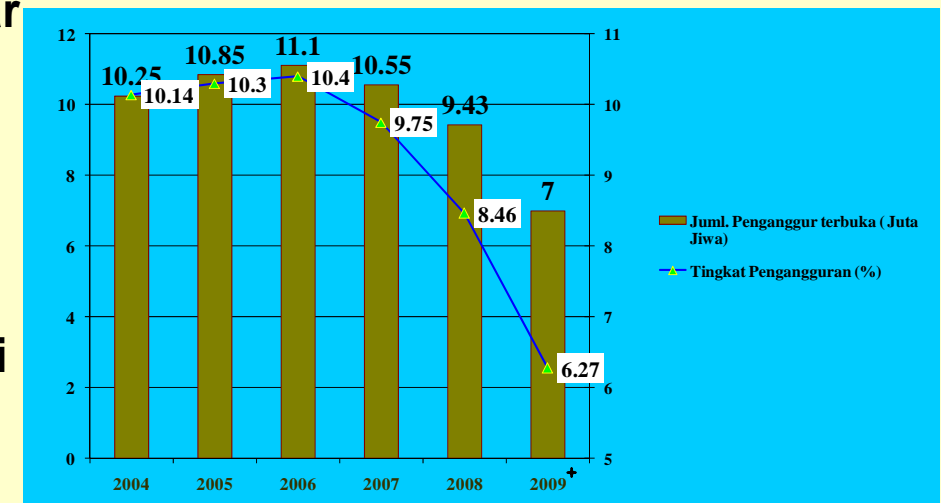
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 “Kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk”
- Undang-undang no 40/2004, tentang SJSN, Fakir miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah
- Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi penduduk miskin
- Fakta Saat ini Derajat Kesehatan Penduduk Miskin Masih Rendah :
  - Kematian bagi pddk miskin 3 kali lebih tinggi daripada pddk tidak miskin,
  - Pengetahuan masyarakat ttg kesehatan dan pendidikan blm mendukung
  - Perilaku hidup bersih di masyarakat belum membudaya,
  - Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kematian Anak serta Angka Kematian I Ibu (AKI) pada pddk miskin jauh lebih tinggi dari yang tidak miskin





## 2. KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 2008

- Jml pddk miskin (pddk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia (Maret 2008) sebesar 34,96 juta jiwa atau 15,42 %.
- Dibandingkan dgn pddk miskin (Maret 2007) : 37,17 juta jiwa (16,58 %), berarti jml pddk miskin tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2,21 juta jiwa. (*BPS, 2008*)
- Jml pengangguran pada Februari 2008 mengalami penurunan sebesar 1,12 juta orang, dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 yi: dari 10,55 juta org (9,75%) pada Februari 2007 menjadi 9,43 juta orang (8,46%) pada Februari 2008. (*BPS, 2008*)
- Dari 9,43 juta penganggur/ pencari kerja, terdapat sekitar 1,1 juta org sarjana pencari kerja.



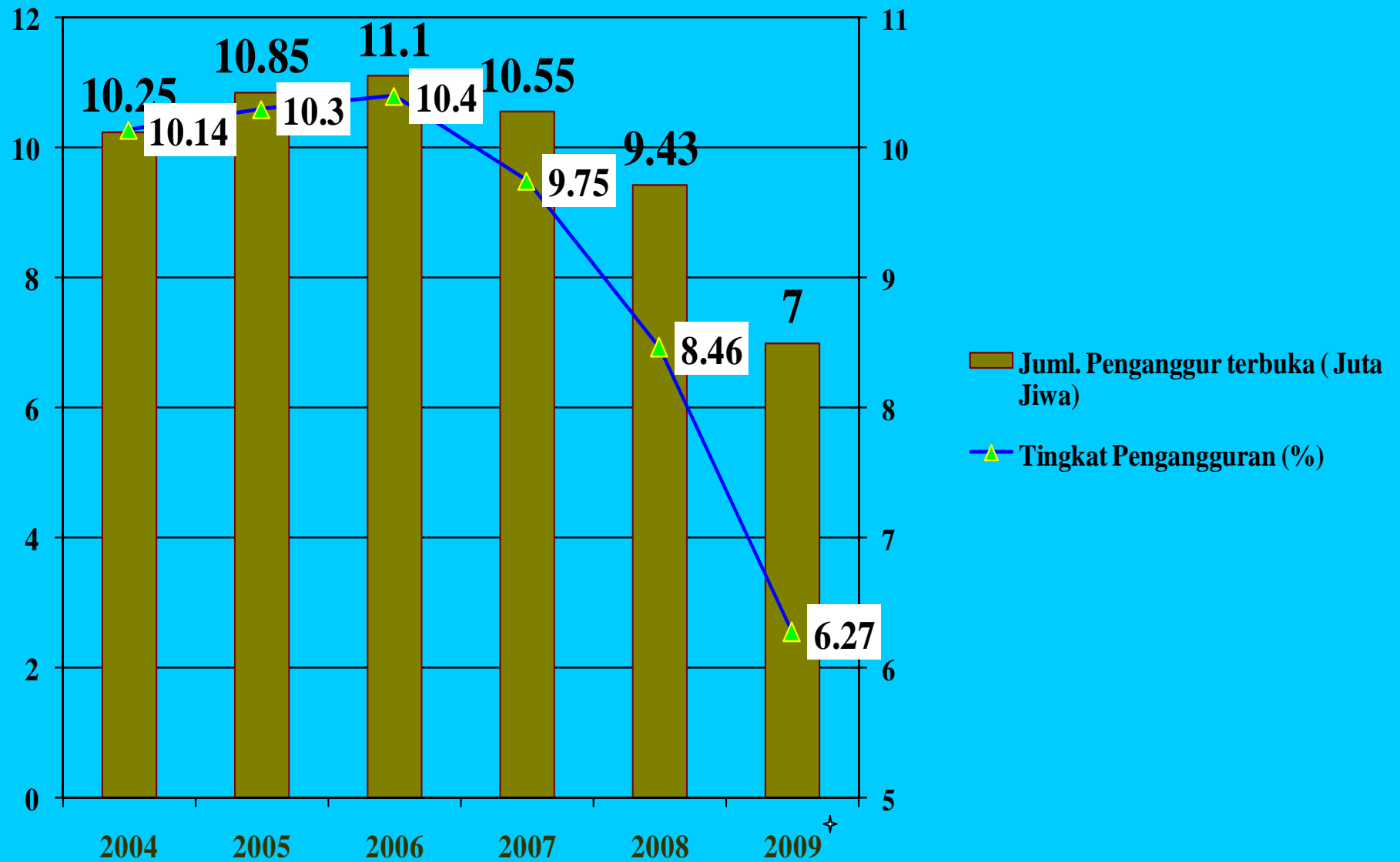


# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT



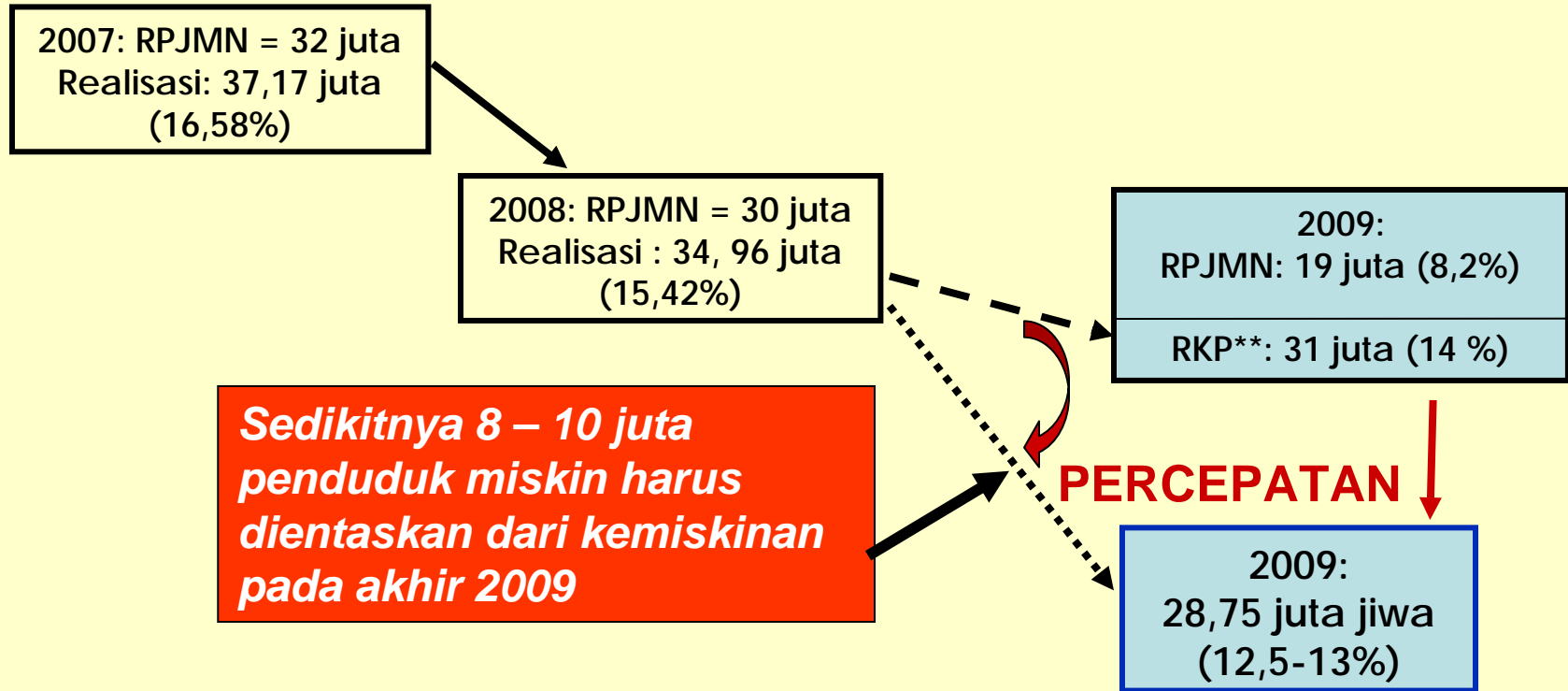


# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT





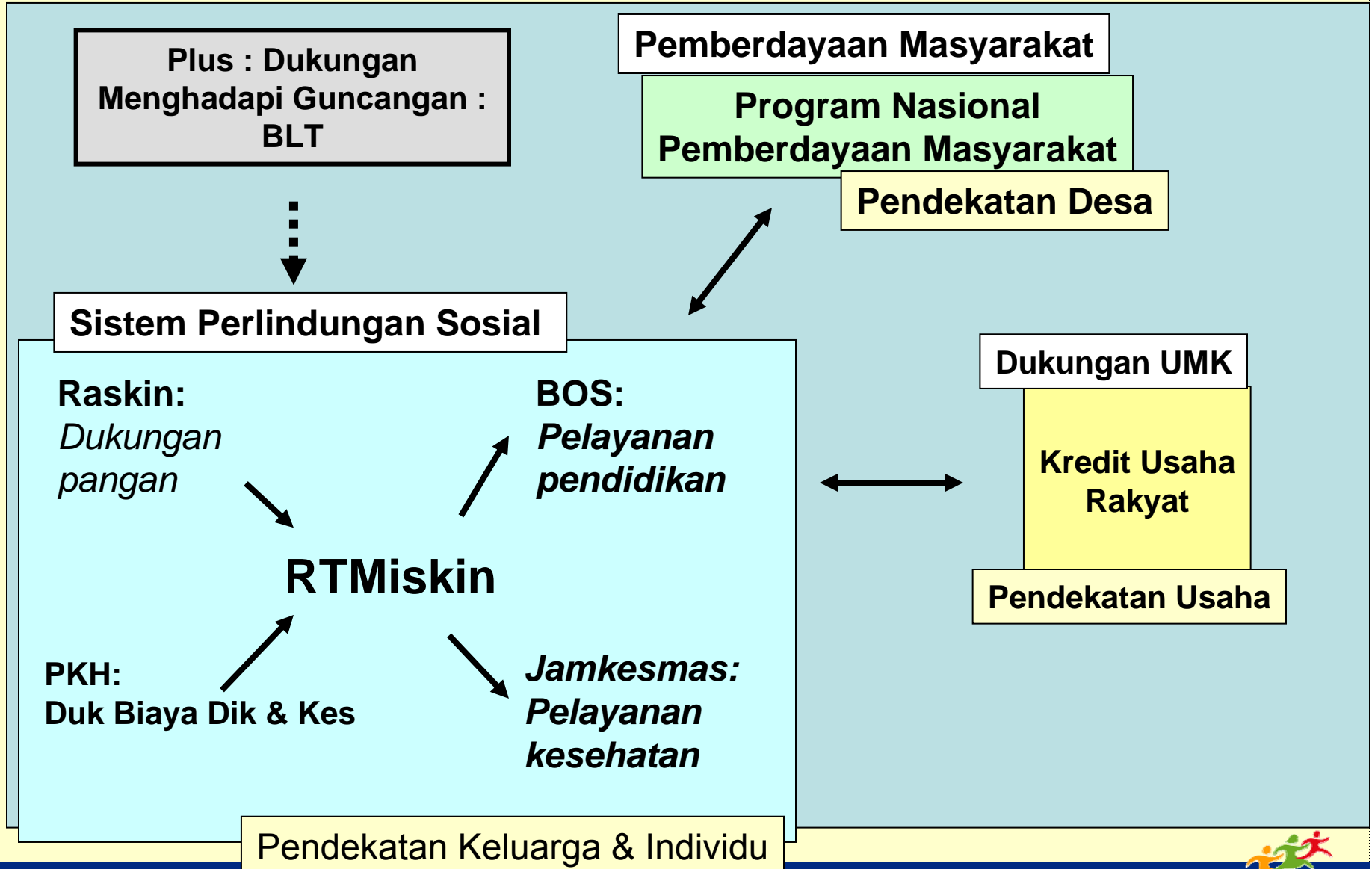
### 3. TARGET PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN PADA Tahun 2009 (TARGET SEBELUM ADA KRISIS KEUANGAN AS)



2009\*\* Angka perhitungan, dengan faktor penentu: pertumbuhan ekonomi makro dan efektivitas berbagai program yang sudah ada.



## 4. Sistem Penanggulangan Kemiskinan Indonesia





## 5. TIGA PAKET BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### PAKET BANTUAN PROGRAM I :

Bantuan dan  
Perlindungan  
Sosial

Sasaran 19,1 juta RTS/  
Rumah Tangga Sasaran  
(BLT, Raskin, PKH, BOS,  
JAMKESMAS, dll)  
termasuk pemberian  
layanan khusus bagi 3,9  
juta RT Sangat Miskin.

Rumah Tangga Sangat  
Miskin, Miskin dan  
Hampir Miskin

### PAKET BANTUAN PROGRAM II:

Pemberdayaan  
Masyarakat

Program PK berbasis  
pemberdayaan masyarakat yang  
tergabung dlm PNPM Mandiri.

Bentuk : Bantuan Langsung  
Masyarakat (BLM) sampai dgn  
maks. Rp. 3 Milyar/kec./thn.

SASARAN : 4.200 kec/26.000  
desa/kel (2008) dan seluruh kec.  
(2009) atau 6.407 kec.

Kelompok Masyarakat  
Miskin dan  
Hampir Miskin

### PAKET BANTUAN PROGRAM III:

Pemberdayaan  
Usaha Mikro  
dan Kecil

Penyaluran kredit oleh bank  
bagi UMK

BENTUK: diarahkan untuk  
kredit modal kerja Rp. 5 Juta ke  
bawah. Plus: penyaluran  
program pendanaan K/L.

SASARAN 2008: 14 Trilyun  
KUR dan 2 Juta nasabah KUR.

SASARAN 2009: 24 Trilyun dan  
4 Juta nasabah KUR.

Pelaku  
Usaha Mikro dan  
Kecil



## **7. IMPLIKASI AWAL PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**

- **Dampak thd kemiskinan dan pengangguran akan mulai terasa pada Semester I Tahun 2009.**
- **Dampak yg paling terasa ada pada angka pengangguran yang dipicu oleh maraknya PHK perusahaan keuangan, perusahaan besar, PMA.**
- **Daya beli masyarakat miskin melemah, akibat kenaikan harga bahan pokok.**
- **Kredit usaha mikro di perbankan mengalami kesulitan, akibat masalah likuiditas.**
- **Dampak thd kemiskinan di perkotaan lebih terasa dibandingkan dengan di perdesaan.**



### STRATEGI MENGHADAPI MASA SULIT ARAHAN PRESIDEN 6 OKTOBER 2008

- OPTIMALKAN APBN 2009 UNTUK TETAP MEMACU MEMBANGUN KEBIJAKAN PRO POOR, PRO JOB CREATION DAN PRO GROWTH PADA SEKTOR EKONOMI MAKRO DAN MIKRO (SEKTOR RIIL) DENGAN MEMPERHATIKAN "*SOCIAL SAFETY NET*"
- ALOKASI ANGGARAN YANG MEMADAI UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN SDM DENGAN FOKUS PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- **PROGRAM 3 KLASTER KITA SUKSESKAN**
- HENTIKAN DAN UBAH SIKAP *EGO-SEKTORAL* DAN "*BUSINESS AS USUAL*" KARENA BETAPAPUN PENTING DAN KUATNYA SEBUAH INSTITUSI TIDAK AKAN PERNAH BISA BEKERJA SENDIRI





## **9. CAPAIAN CAKUPAN PROGRAM SAAT INI**

<b>KLASTER I</b>	<b>Capaian (per 8 Oktober 2008)</b>
<b>•Bantuan Langsung Tunai</b>	
<b>-- Tahap I</b>	<b>Kartu : 17,67 juta (92,8% dari target), Ditransfer ke PT Pos Rp 5,71 trilyun; Dibayarkan: Rp. 4,98 trilyun, kepada 16,6 juta RTS (87,32% dari target)</b>
<b>-- Tahap II</b>	<b>Ditransfer ke PT Pos Rp 7,19 trilyun Dibayarkan: Rp 4,71 trilyun, kepada 11,79 juta RTS (61,98% dari target)</b>
<b>•Beras utk RT Sasaran</b>	<b>Disalurkan 2,299 juta ton beras atau 83,33% dari target</b>
<b>•Program Keluarga Harapan (PKH)</b>	<b>Pelaksanaan uji coba kepada 621 ribu RTSM, di 13 propinsi, 70 kabupaten/kota, 629 kecamatan</b>
<b>•Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)</b>	<b>73,77 juta kartu (96,6%) terselesaikan</b>
<b>•Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	<b>Depdiknas 73,69% dana tersalurkan Depag 73,35% dana tersalurkan</b>



## CAPAIAN SAAT INI

### KLASTER II

- *PNPM MANDIRI*: Realisasi 2008: **4.768 Kec** di 36.400 desa dengan total dana Rp **7,14 Trilyun**, dan Target 2009: **6.407 Kec.** dengan total dana **Rp 9,7 Trilyun**.
- *PNPM Mandiri utk Fakir Miskin & KAT/ BLPS-KUBE 2008*: **3.802 KUBE** di 33 prov., 99 kab/kota sekitar **14.218 KK**

### KLASTER III

- Jumlah Penerima *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, pada akhir Agustus 2008 : **1.193.481 Nasabah (59,92%)**, dgn total dana yang disalurkan: **Rp. 10,10 Trilyun (67,39%)**.





## 10. LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PELAKSANAAN 3 KLASTER PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### KLASTER I

#### Bantuan dan Perlindungan Sosial

#### Permasalahan:

- RTSM akan merasakan dampak akibat krisis keuangan dunia berupa menurunnya daya beli dan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

#### Tindak Lanjut:

- Percepatan pelaksanaan tahun 2008 dengan mengacu pada data terbaru 19,1 juta RTS dari BPS.
- BLT 2009 perlu diberikan selama 6 bulan.
- BTB/PKH ditambah untuk 750.000 RTSM yang mempunyai ibu hamil dan anak-anak usia SD.





## KLASTER II

### Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri (1)

#### Permasalahan:

- Pelaksanaan PNPM Mandiri th 2008 masih terhambat oleh lemahnya 'komitmen dan kinerja yang buruk dari Pemda : 134 kab/kota ( 27%) belum membentuk satker dan sekitar 11 kab/kota tidak mau menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri.
- Papua dan Papua Barat belum mencairkan BLM dari Dana Otsus/APBD-nya sehingga menghambat pencairan BLM dari APBN.
- Dengan alokasi anggaran terbatas untuk th 2009 dan jumlah kecamatan yang meningkat, maka sulit untuk mencapai sasaran BLM 3 M per kecamatan

#### Tindak Lanjut:

- Percepatan pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 pada periode Okt- Des th 2008:
- Mendesak pemda Provinsi Papua dan Papua Barat mencairkan dana BLM Program Respek sebesar Rp.100 juta/kampung segera.
- Mendesak pemda kabupaten/kota yang belum membentuk satker agar segera membentuk dan memproses pencairan BLM dan gaji para fasilitator.
- Pemda kab/kota yang tidak menyediakan dana APBD th 2007 dan th 2008 dan tidak memberikan 'komitmen tertulis' utk tidak diberikan lagi alokasi dana PNPM Mandiri pada th 2009.



## KLASTER II :PNPM Mandiri (2)

### Penyiapan PNPM Mandiri th 2009 :

- Proses persiapan negosiasi loan untuk PNPM Mandiri th 2009 :
  - Bank Dunia : US \$ 254 juta untuk PNPM Perdesaan dan US \$ 187,6 juta untuk PNPM Perkotaan,
  - ADB (US \$ 50 juta) untuk RISP\* di Lampung, Jabar, Jateng dan Jatim.
  - DFID (US \$ 57,9 juta) untuk PNPM Perdesaan di Papua dan Papua Barat
  - IDB (US \$ 80 juta ) untuk PNPM Perdesaan di Prop.Sumatera dan NAD.
- Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri th 2009 diberikan pada seluruh kecamatan sesuai Permendagri no. 6/2008 dan kecamatan- pemekaran s/d April 2008., atau 6.407 kecamatan di 465 kab/kota.
- Total BLM : Rp. 9.748.765 M terdiri atas BLM (APBN ) : Rp. 7.643.327 M dan Rp. 2.105.439 M ( APBD)  
Besaran BLM proporsional dgn tk kemiskinan di kecamatan
- Rerata BLM per kecamatan sekitar 2.2 M /kecamatan. Bila ingin ditingkatkan menjadi rerata 3 M /kec, perlu penambahan dana sebesar Rp. 4 T.
- Bagi kecamatan pemekaran yg perangkatnya belum siap, BLM , Bantuan Teknis dan fasilitator dititipkan pada kecamatan induknya.

\*RISP: *Rural Infrastructure Support Project*



## 11. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

### ❑ Pilihan yang perlu diputuskan :

- **Alternatif I :** Anggaran PNPM Mandiri tetap berdasarkan RKP th 2009 yi : **Rp. 9,7 Triliun (PNPM Inti)** dan **Rp. 4,88 T (PNPM Penguatan)** dgn rerata BLM per kec.yi : **Rp. 2,55 M** dan pencapaian sasaran penurunan kemiskinan th 2009 pada kisaran **14 % (turun 1 %)**, atau
- **Alternatif II :** Penambahan Anggaran PNPM Mandiri ditambah **Rp 3,8 T** pada **PNPM Inti**, untuk dapat memenuhi BLM maksimal **Rp. 3 Milyar/kecamatan** → mampu mencapai sasaran th.2009, sebesar : **12,5 – 13 %**.

### ❑ **Penyerapan tenaga kerja 1,1 Juta “Sarjana Penganggur”** → semua kementerian terkait mengembangkan **peluang** untuk menjadi :

- Sosialisator/penyuluh kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat di setiap desa.
- Fasilitator/Pendamping program di 3 Klaster Program
- Pemantau Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di desa./Kec .



## 12. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan a.l :

- Memandirikan masyarakat untuk hidup sehat
- Meningkatkan kualitas hidup dan berperilaku hidup bersih dan sehat melalui program pemberdayaan masyarakat seperti halnya :
  - a. Program Desa Siaga
  - b. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( *Water and Sanitation for Low Income Community/WSLIC*),
  - c. Program Revitalisasi Posyandu, dll
- Dilaksanakan secara koordinatif dengan instansi Pemerintah Pusat Lintas Sektor , Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta (*Public Private Partnership*) , Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pemda, UN dan negara donor





### 13. PNPM yang terkait dgn Pembangunan Kesehatan

- PNPM Pengembangan Infra struktur Sos- Ek Wilayah (PNPM – PISEW) merupakan pendekatan partisipatif percepatan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal dgn tujuan :
  - a. Mengurangi kesenjangan antar wilayah dgn cara membentuk dan membangun kawasan strategis kabupaten (KSK)
  - b. Memperkuat lembaga pemerintah daerah dan institusi lokal di tingkat desa
  - c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Secara umum PNPM PISEW terdiri dari 2(dua) komponen :

1) Penyediaan infrastruktur dasar pedesaan skala kecil yg mencakup 6 kategori:

1. Transportasi
2. Peningkatan produksi pertanian
3. Peningkatan pemasaran pertanian
4. Air bersih dan sanitasi lingkungan
5. Pendidikan
6. Kesehatan

2) Pelatihan dan Pendampingan bagi masyarakat dan aparatur pemda

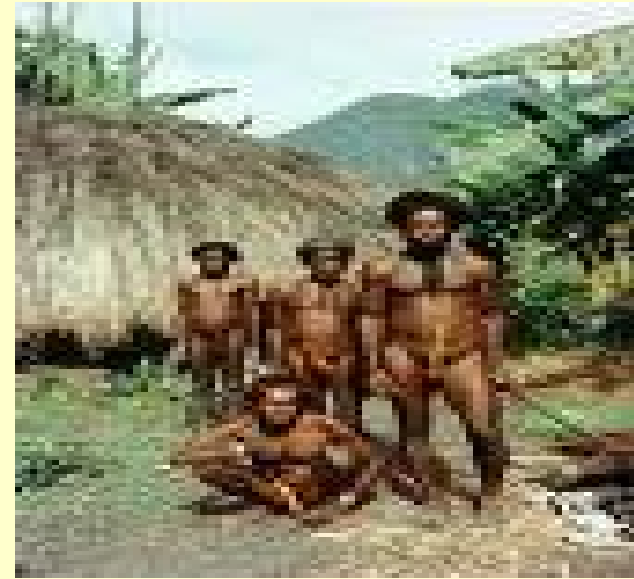
Pelaksanaan PNPM-PISEW mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Diusulkan lewat Renstrada kecamatan dan Kabupaten melalui Musrenda

Sumber : *Bappenas*



**TANTANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAN  
PENGURANGAN PENGANGGURAN**

1. Masyarakat di daerah terisolasi dan tertinggal
2. Di daerah pasca bencana
3. Di wilayah kabupaten pemekaran baru





- *Terima Kasih*





## *Lampiran*

1. Rekapitulasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM MANDIRI T.A. 2009
2. Kriteria Kemiskinan Variabel Non-Monetary
3. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008(PPLS08)
4. Situasi Kemiskinan Indonesia: Trend 1976 – 2008 (Data Makro)
5. Situasi Kemiskinan: Perkembangan antar propinsi 2007-2008 (Data Makro)



# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

## REKAPITULASI LOKASI DAN ALOKASI BLM PNPM MANDIRI T.A. 2009

No.	Provinsi	Wilayah PNPM Mandiri		Cakupan Program										Komposisi Dana (juta Rp)		
		Kab./Kota	Kec.	PNPM Perdesaan		PNPM Perkotaan		PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus		PNPM Infrastruktur Perdesaan		PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah		Total BLM	Sumber APBN	Sumber APBD
				Jumlah Kec.	Jumlah BLM (juta Rp)	Jumlah Kec.	Jumlah BLM (juta Rp)	Jumlah Kec.	Jumlah BLM (juta Rp)	Jumlah Kec.	Jumlah BLM (juta Rp)	Jumlah Kec.	Jumlah BLM (juta Rp)			
1	Nanggroe Aceh Darussalam	23	269	237	398.900	32	48.180	0	0	0	0	0	0	447.080	349.272	97.809
2	Sumatera Utara	28	400	277	378.500	70	89.140	0	0	0	0	53	79.500	547.140	437.950	109.190
3	Sumatera Barat	19	171	121	132.500	32	49.400	0	0	18	27.250	0	0	209.150	150.173	58.978
4	Riau	11	151	60	66.200	20	20.770	0	0	71	126.500	0	0	213.470	176.517	36.953
5	Jambi	10	116	64	75.000	9	11.940	0	0	26	48.250	17	25.500	160.690	128.625	32.065
6	Sumatera Selatan	15	212	106	124.500	39	45.030	0	0	67	132.000	0	0	301.530	263.628	37.902
7	Bengkulu	9	116	53	74.800	14	14.625	18	12.250	6	10.750	27	40.500	152.925	132.925	20.000
8	Kep. Bangka Belitung	7	40	12	17.100	11	11.940	0	0	0	0	17	25.500	54.540	43.791	10.749
9	Kep. Riau	6	56	35	34.900	21	15.830	0	0	0	0	0	0	50.730	26.265	24.465
10	Lampung	11	203	116	187.700	21	24.965	17	15.750	51	105.750	0	0	334.165	286.256	47.910
11	Banten	7	154	106	218.800	44	85.220	0	0	4	7.750	0	0	311.770	243.682	68.089
12	Jawa Barat	26	618	396	628.200	197	318.650	0	0	25	29.500	0	0	976.350	756.073	220.278
13	DKI Jakarta	6	44	0	0	44	51.255	0	0	0	0	0	0	51.255	25.628	25.628
14	DI Yogyakarta	5	78	36	40.800	42	39.985	0	0	0	0	0	0	80.785	61.981	18.804
15	Jawa Tengah	35	572	403	726.000	148	337.265	0	0	22	33.750	0	0	1.097.015	869.275	227.741
16	Jawa Timur	38	660	475	975.100	152	332.160	0	0	33	54.000	0	0	1.361.260	1.074.238	287.022
17	Kalimantan Barat	14	173	98	140.600	14	14.375	28	20.750	15	21.750	19	28.500	225.975	192.161	33.815
18	Kalimantan Selatan	13	151	88	71.300	19	36.785	0	0	17	23.250	28	42.000	173.335	133.364	39.972
19	Kalimantan Tengah	14	119	88	87.500	6	6.190	17	9.250	8	11.750	0	0	114.690	72.825	41.865
20	Kalimantan Timur	14	135	98	104.700	25	29.470	0	0	12	16.250	0	0	150.420	84.435	65.985
21	Sulawesi Utara	13	148	106	99.900	35	40.970	0	0	7	10.500	0	0	151.370	110.835	40.535
22	Sulawesi Selatan	23	303	205	298.700	39	55.220	0	0	30	52.750	29	43.500	450.170	361.521	88.650
23	Sulawesi Barat	5	66	42	70.600	2	3.310	0	0	4	5.250	18	27.000	106.160	90.078	16.082
24	Sulawesi Tengah	10	147	112	170.100	6	11.320	25	13.250	5	7.250	0	0	201.920	165.936	35.984
25	Sulawesi Tenggara	12	175	150	193.700	14	18.735	0	0	11	15.000	0	0	227.435	182.123	45.312
26	Gorontalo	6	65	53	81.500	8	10.630	0	0	4	6.750	0	0	98.880	78.533	20.347
27	Ball	9	56	45	17.000	11	28.150	0	0	0	0	0	0	45.150	30.395	14.755
28	Nusa Tenggara Timur	20	285	220	376.700	12	24.285	29	18.500	24	30.000	0	0	449.485	366.256	83.229
29	Nusa Tenggara Barat	9	116	59	113.400	23	34.665	0	0	5	6.000	29	43.500	197.565	163.752	33.813
30	Maluku	9	78	35	33.900	10	12.840	32	18.250	6	7.500	0	0	72.490	60.912	11.578
31	Maluku Utara	8	110	76	91.100	14	16.930	20	11.750	0	0	0	0	119.780	76.007	43.774
32	Papua	21	312	299	442.600	5	4.715	0	0	8	10.500	0	0	457.815	353.280	104.535
33	Papua Barat	9	108	102	151.600	6	4.670	0	0	0	0	0	0	156.270	94.640	61.630
<b>TOTAL</b>		<b>465</b>	<b>6.407</b>	<b>4.373</b>	<b>6.623.900</b>	<b>1.145</b>	<b>1.849.615</b>	<b>186</b>	<b>119.750</b>	<b>479</b>	<b>800.000</b>	<b>237</b>	<b>355.500</b>	<b>9.748.765</b>	<b>7.643.327</b>	<b>2.105.439</b>



**Kriteria Kemiskinan Variabel Non-Monetary**

Variabel Kemiskinan	Kriteria
1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m <sup>2</sup>
2. Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3. Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5. Sumber air minum	Bukan air bersih
6. Penerangan yang digunakan	Bukan listrik atau listrik tanpa meteran
7. Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8. Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13. Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD
14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

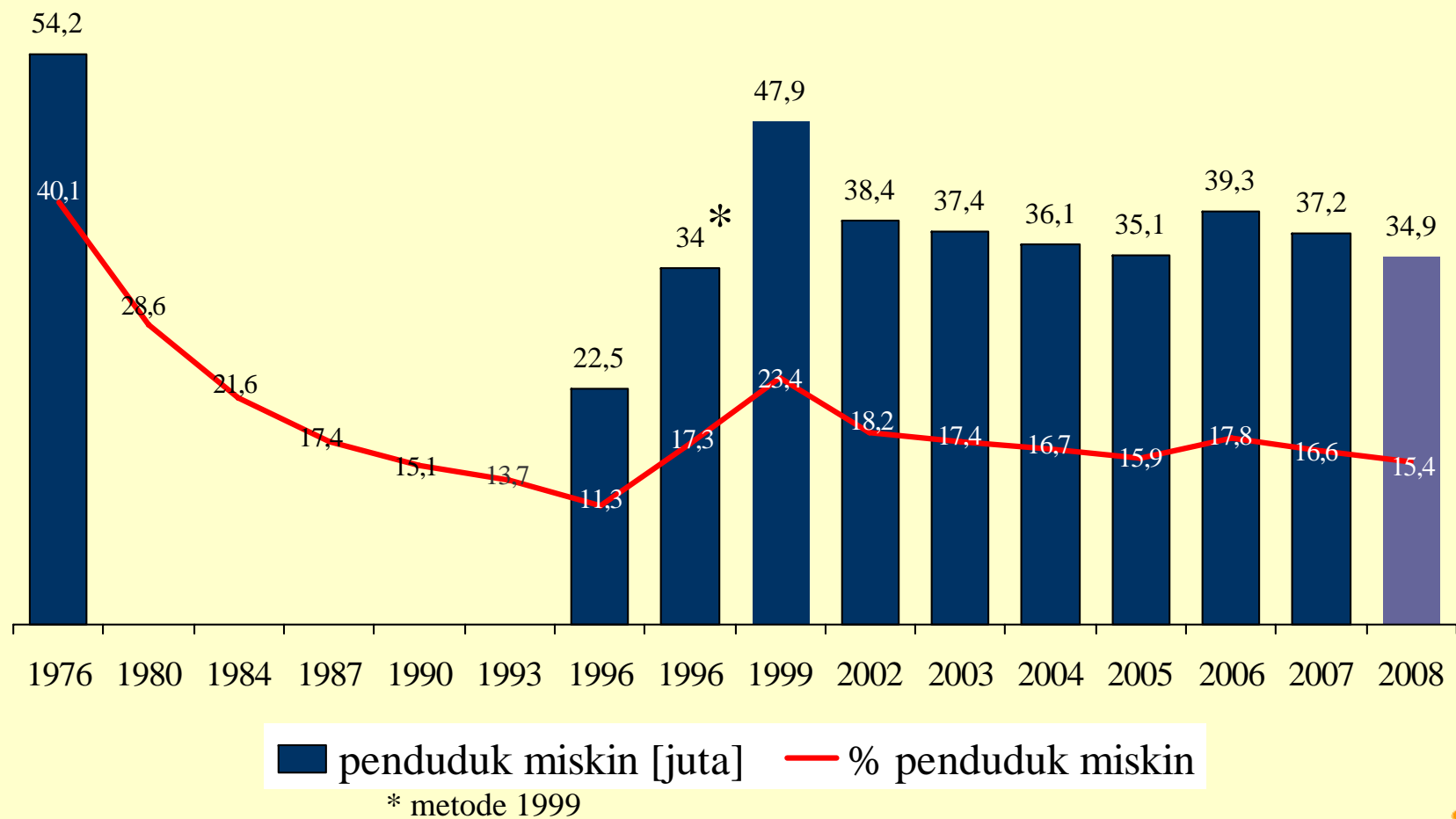


Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008  
(PPLS08)

- **Ide dasar:**
  - Satu database untuk semua program pengentasan kemiskinan dalam Klaster 1 Bantuan dan Pelindungan Sosial: BLT, Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa, bantuan kelompok rentan lain
  - Fasilitasi bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan terukur
  - **Exit Strategy:** pengadaan data diarahkan untuk program jangka panjang, BLT program '*shock breaker*' dapat memanfaatkannya
- **Informasi yang akan dikumpulkan:**
  - Jamkesmas: nama anggota rumah tangga/keluarga
  - PKH (*demand side*): nama, jenis kelamin, umur, status sekolah, balita, usia pendidikan dasar, WUS, status pekerjaan, kecacatan
  - Reforma agraria: lapangan pekerjaan pertanian dan luas lahan
  - Bea Siswa: nama murid SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa



### Situasi Kemiskinan Indonesia: Trend 1976 – 2008 (Data Makro)





## Situasi Kemiskinan: Perkembangan antar propinsi 2007-2008 (Data Makro)

